

TUGAS 2.1

PERANGKAT

PEMBELAJARAN

Erni Nurpratiwi,S.Pd

RPP KEBIJAKAN FISKAL
SMAN 26 BANDUNG

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 26 Bandung
Mata Pelajaran : Ekonomi
Kelas/Semester : XI / 2
Materi Pokok : Kebijakan Fiskal
Alokasi waktu : 10 menit

A. Kompetensi Inti

KI 1	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2	Menghayati dan mengamalkan perilaku a. jujur, b. disiplin, c. santun, d. peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), e. bertanggung jawab, f. responsif, dan g. pro-aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional
KI 3	Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang a. ilmu pengetahuan, b. teknologi, c. seni, d. budaya, dan e. humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4	Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: a. efektif, b. kreatif, c. produktif, d.kritis, e. mandiri, f. kolaboratif, g.komunikatif, dan h. solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator
3.5 Menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal	Pertemuan 1 3.5.1 Menjelaskan pengertian kebijakan fiskal 3.5.2 Menjelaskan tujuan kebijakan fiskal 3.5.3 Mengidentifikasi instrumen kebijakan fiskal 3.5.4 Menganalisis peran kebijakan fiskal dalam perekonomian
4.5 Menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal	

C. Tujuan Pembelajaran

Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran *discovery learning* peserta didik dapat Menganalisis kebijakan moneter dan fiskal dengan mengembangkan sikap peduli, tanggung jawab, proaktif dan disiplin.

D. Materi Pembelajaran

1. Faktual

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang selalu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian khususnya yang berhubungan dengan keuangan negara

2. Konseptual

Secara konseptual Kebijakan fiskal memiliki bauran kebijakan yang meliputi kebijakan fiskal fungsional, Kebijakan Pengelolaan Anggaran (The Managed Budget Approach), Kebijakan Stabilitas Anggaran Otomatis (The Stabilizing Budget), dan Kebijakan Anggaran Belanja Berimbang (Balanced Budget Approach)

3. Prosedural

Dalam kebijakan fiskal memiliki dua instrumen yaitu pengeluaran pemerintah dan pajak. Melalui dua instrumen tersebut pemerintah mengatur dan mengelola perekonomian negara.

4. Metakognitif

Mandiri dan kreatif dalam membuat laporan kajian tentang kebijakan fiskal.

E. Pendekatan/ Model/ Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : Pendekatan saintifik (*scientific*).

2. Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan

3. Model : *Discovey Learning*

F. Media dan alat pembelajaran

1. Media :

- a. Slide *powerpoint*
- b. Video (internet)
- c. Kutipan berita mengenai kebijakan fiskal

2. Alat dan bahan :

- a. Laptop
- b. Papan tulis
- c. modul

B. Sumber Belajar

Alam S., 2013. *Mandiri Ekonomi Untuk SMA dan MA Kurikulum 2013*. Jakarta : Erlangga.

Rahardja, Pratama, dkk. 2015. *Eksplorasi Nalar Siswa Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI*. Bandung: Yrama Widya.

C. Kegiatan pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
<p>PENDAHULUAN</p>	<p>1. Peserta didik melakukan Salam, Berdoa, Presensi;</p> <p>2. Apersepsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peserta didik diminta membersihkan sampah disekitar tempat duduknya - Peserta didik diminta turut bertanggung jawab memanfaatkan lingkungan dengan bijak dan berorientasi pada kemaslahatan bersama - Peserta didik diberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi dan LKPD yang bertujuan untuk menumbuhkan konsentrasi peserta didik. <p>3. Motivasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari; <p>4. Pemberian acuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan; dan - menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan - Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok belajar - Peserta didik mengetahui mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 	<p>2 menit</p>

<p>KEGIATAN INTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stimulation (memberi stimulus): - Peserta didik mengamati tayangan video dan <i>powerpoint</i> yang berkaitan dengan kebijakan fiskal. Sehingga timbul kesadaran peserta didik untuk lebih mengenal mengenai kebijakan fiskal. - Peserta didik memperoleh dan mengamati LKPD mengenai kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menggiring peserta didik agar lebih memahami mengenai kebijakan fiskal <ul style="list-style-type: none"> • Problem Statement (mengidentifikasi masalah): - Peserta didik berpikir kritis untuk mengajukan pertanyaan mengenai bagian yang belum dipahami dari LKPD <ul style="list-style-type: none"> • Data Collecting (mengumpulkan data) - Peserta didik secara kelompok bekerja sama dengan cara berdiskusi mencari serta mengumpulkan data/informasi yang berkaitan dengan kebijakan kebijakan fiskal yang didapat dari buku paket Ekonomi kelas XI, sumber lain yang relevan, termasuk penggunaan sumber digital berdasarkan LKPD. <ul style="list-style-type: none"> • Data Processing (mengolah data) 	<p>6 menit</p>
-----------------------------	---	----------------

	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta didik berpikir kritis dalam diskusi kelompok untuk mengolah data hasil pengamatan dengan menggunakan berbagai informasi yang telah dikumpulkan dan membuat kesimpulan sementara hasil kesepakatan dari kelompoknya. • Verification (memverifikasi) - Peserta didik secara kelompok mengomunikasikan proses dan hasil penyelesaian masalah, untuk membandingkan hasil diskusi antar kelompok • Generalization (menyimpulkan) - Peserta didik dan guru menyimpulkan hasil penyelesaian masalah/ diskusi kelompok. <p>Catatan : Selama pembelajaran kebijakan fiskal berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif (berpikir kritis) dan pro-aktif (kreatif), serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik.</p>	
<p>PENUTUP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan memberikan beberapa soal pilihan ganda. • Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 	<p>2 menit</p>

D. Penilaian Proses dan Hasil Belajar

1. Teknik Penilaian:

- a. Penilaian Sikap : Observasi
- b. Penilaian Pengetahuan : Test Tulis
- c. Penilaian Keterampilan : Unjuk Kerja

2. Bentuk Penilaian:

- a. Observasi : Lembar Observasi
- b. Tes Tulis : Pilihan ganda
- c. Penugasan : Lembar Penugasan
- d. Unjuk kerja : Lembar penilaian presentasi dan rubric

3. Instrumen Penilaian (terlampir)

E. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Remedial

Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran Ekonomi, maka guru mengulang kembali materi yang belum dipahami oleh peserta didik dan memberi tugas berupa soal yang nantinya dikerjakan ulang oleh peserta didik tersebut.

2. Pengayaan

Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) Ekonomi kelas XI Semester 1. Guru bisa memberikan pengayaan dengan memberikan soal tambahan yang memiliki kriteria soal HOTS.

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

Bandung, Juli 2021
Guru Mata Pelajaran,

Drs. H. Warya Aris Purnama,MM
NIP. 196107101989031008

Erni Nurpratiwi, S.Pd

LAMPIRAN

MATERI

Pengertian kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan Fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.

Kebijakan Fiskal yang sering disebut “politik fiskal” atau “fiscal policy” biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja Negara terdiri dari penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “government expenditure” dan “government transfer”, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak memperbesar atau memperkecil “government expenditure” dan atau memperbesar atau memperkecil “government transfer” yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.

Sadono Sukirno, 2003 Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

Tujuan kebijakan Fiskal

Berikut ini adalah beberapa tujuan kebijakan fiskal antara lain:

- Menciptakan stabilitas perekonomian
- Menciptakan lapangan pekerjaan
- Menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan
- Mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran
- Mempertahankan stabilitas harga
- Memacu pertumbuhan ekonomi negara
- Mendorong lajunya investas
- Untuk mewujudkan keadilan sosial

Jenis kebijakan Fiskal

1. Kebijakan Anggaran Pembiayaan Fungsional (Functional Finance)

Dalam hal ini pengeluaran dan penerimaan pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama guna meningkatkan kesempatan kerja (employment). Misalnya kebijakan perpajakan. Di satu pihak pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah, di lain pihak pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta maupun individu. Sehingga dalam kondisi banyaknya pengangguran, pajak sama sekali tidak diperlukan. Lalu, kebijakan apa yang dipakai? Melakukan pinjaman yang dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang tersedia dalam masyarakat.

2. Kebijakan Pengelolaan Anggaran (The Managed Budget Approach)

Pada pendekatan ini pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman senantiasa dihubungkan. Hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun surplus. Kebijakan anggaran defisit adalah pengaturan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Kebijakan ini biasa diterapkan dalam keadaan deflasi, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan jumlah barang-barang dan jasa berkembang lebih cepat daripada perkembangan jumlah uang.

3. Kebijakan Stabilitas Anggaran Otomatis (The Stabilizing Budget)

Dengan kebijakan stabilitas anggaran otomatis, pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan atas perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh.

4. Kebijakan Anggaran Belanja Berimbang (Balanced Budget Approach)

Kebijakan anggaran belanja seimbang adalah pembelanjaan secara seimbang dalam jangka panjang, tetapi ditempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Dapat pula ditempuh melalui pendekatan dengan mempertahankan keseimbangan anggaran. Dalam masa depresi, pengeluaran perlu ditingkatkan, diikuti pula dengan peningkatan penerimaan sehingga tidak akan memperbesar utang negara

Instrumen kebijakan Fiskal

Di dalam kebijakan fiskal ada dua instrumen utama yaitu pengeluaran pemerintah dan pajak. Secara hukum pajak dapat didefinisikan sebagai luran wajib kepada pemerintah yang sifatnya memaksa dan legal berdasarkan undang-undang.

Sedangkan secara ekonomi pajak dapat didefinisikan sebagai sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung.

Peran kebijakan Fiskal dalam perekonomian

Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan Nasional. ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus deficit, dan sebagainya.

Bagi Negara-negara yang sedang berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Dari bagian 1 kita telah mengetahui bahwa untuk meningkatnya tingkat hidup suatu masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk memperbesar kapasitas produksi nasional dibutuhkan adanya *capital formation*. Dengan demikian berarti masyarakat perlu mengadakan investasi yang cukup besar untuk terwujudnya *capital formation* yang dibutuhkan tersebut.

**LAMPIRAN
INSTRUMEN PENILAIAN**

1. Penilaian Sikap

No.	Waktu	Nama	Kejadian/ Prilaku	Aspek Sikap	Positif/ Negatif	Tindak Lanjut
1.						
2.						
3.						
dst						

2. Penilaian Pengetahuan

A. Tes Tertulis

1) Kisi-kisi soal :

No	IPK DARI KD 3.5	INDIKATOR SOAL	RENCANA PENILAIAN	
			TEHNIK	WAKTU PELAKSANAAN
1.	3.5.1 Menjelaskan pengertian kebijakan fiskal	3.5.1.1 disajikan soal mengenai definisi kebijakan fiskal, peserta didik dapat menjelaskan definisi dari kebijakan fiskal	Tes tulis (uraian)	Akhir pertemuan kedua

	<p>3.5.2 Menjelaskan tujuan kebijakan fiskal</p>	<p>3.5.2.1 disajikan soal mengenai kebijakan pemerintah dalam masalah perekonomian, peserta didik mampu menentukan tujuan kebijakan fiskal</p>	<p>Tes tulis (uraian)</p>	<p>Akhir pertemuan kedua</p>
	<p>3.5.3 Mengidentifikasi instrumen kebijakan fiskal</p>	<p>3.5.3.1 disajikan soal tentang permasalahan ekonomi, peserta didik dapat menentukan instrumen yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut</p>	<p>Tes tulis (uraian)</p>	<p>Akhir pertemuan kedua</p>
		<p>3.5.3.2 disajikan soal mengenai instrumen</p>	<p>Tes tulis (uraian)</p>	<p>Akhir pertemuan kedua</p>

		kebijakan fiskal, peserta didik mampu menentukan tujuan penerapan instrumen kebijakan fiskal dengan benar		
	3.5.4 Menganalisis peran kebijakan fiskal dalam perekonomian	3.5.4.1 disajikan soal tentang kebijakan fiskal, peserta didik dapat menganalisis peran kebijakan fiskal dalam perekonomian.	Tes tulis (uraian)	Akhir pertemuan kedua

2) Butir soal Tes Tertulis

1. Kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi disebut dengan
 - A. Kebijakan moneter
 - B. Kebijakan pengeluaran
 - C. Kebijakan penerimaan

- D. Kebijakan APBN
 - E. Kebijakan fiskal
2. Perhatikan pernyataan berikut
- 1) Menciptakan lapangan pekerjaan
 - 2) Mengatur inflasi dengan mengatur perbankan
 - 3) Menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan
 - 4) Mencapai keseimbangan eksternal dengan mengatur suku bunga
 - 5) Mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran
 - 6) Untuk mewujudkan keadilan sosial

Dari pernyataan tersebut yang merupakan tujuan dari kebijakan fiskal adalah

- A. 1,2,3 dan 4
 - B. 1,2,4 dan 5
 - C. 1,3,5 dan 6
 - D. 2,3,4 dan 5
 - E. 3,4,5 dan 6
3. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, penyebab utamanya tidak lain dikarenakan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Pengangguran merupakan masalah yang susah dikendalikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga banyak menimbulkan dampak negatif khususnya bagi perekonomian di negara ini. Dari ilustrasi tersebut, kebijakan fiskal apa yang tepat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah penganggurnya tersebut?
- A. Menurunkan suku bunga
 - B. Menurunkan pajak pendapatan
 - C. Meningkatkan pajak pendapatan
 - D. Meningkatkan penawaran uang

- E. Mengurangi pengeluaran agregat
4. Berikut ini yang termasuk instrumen kebijakan fiskal, yaitu ...
- transfer pemerintah dan pinjaman pemerintah
 - pajak dan pengeluaran pemerintah
 - pajak dan bunga
 - subsidi dan dana cadangan
 - pajak dan pinjaman pemerintah
5. Jika anggaran negara mengalami surplus, berarti ...
- Total penerimaan negara lebih besar dibandingkan pengeluaran pembangun
 - total penerimaan negara lebih kecil dibandingkan pengeluaran negara
 - total penerimaan negara lebih besar dibandingkan pengeluaran negara
 - total penerimaan pembangunan lebih kecil dibandingkan pengeluaran pembangunan
 - total penerimaan negara sama dengan pengeluaran negara

3) kunci jawaban tes tertulis

No. Soal	Jawaban	Skor
1.	E	20
2.	C	20
3.	E	20
4.	B	20
5.	C	20

4) Pedoman penskoran

Kriteria	Skor
Jika jawaban benar sesuai dnegan kunci jawaban	20
Jika jawaban salah tidak sesuai dnegan kunci jawaban	0

Nilai akhir = Jumlah total skor benar

Skor maksimum = 100

B. Diskusi/presentasi kelompok

KD : 3.5 Menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal

4.5 Menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dna kebijakan fiskal

1) Kasus diskusi

JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, kasus Freeport menjadi momen untuk meletakkan dasar-dasar reformasi fiskal, sehingga menjamin kesinambungan fiskal dan investasi.

Yustinus mengemukakan investasi menuntut integrasi kebijakan untuk menciptakan 3C (certainty, clarity, consistency) di bidang fiskal. Karena keputusan investasi bergantung pada kebijakan pro-bisnis, lingkungan bisnis yang kompetitif, stabilitas politik dan regulasi, kejelasan dan kepastian hukum, serta kebijakan fiskal yang menjadi faktor penentu besaran investasi dan tingkat imbal hasil.

Namun faktanya, terdapat beberapa disinsentif fiskal yang dirasakan industri hulu migas dan tambang. Salah satu masalah utama ketiadaan

ketentuan *assume and discharge* yang menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian hukum.

“Kasus yang menarik perhatian publik saat ini adalah dinamika PT Freeport Indonesia yang berawal pada diterbitkannya PP No 1 Tahun 2017. Pada prinsipnya, investor membutuhkan jaminan kepastian akan iklim bisnis dan investasi di masa mendatang karena akan berinvestasi dalam jumlah yang sangat besar dan jangka waktu yang panjang,” ujar Yustinus dalam keterangan resmi, Kamis (23/3/2017). Klausul ini berarti kebijakan fiskal berperan sebagai instrumen yang mampu memberikan kepastian hukum, mendukung iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas, konsisten dan stabil, melalui administrasi yang sederhana, mudah dilaksanakan dan murah, atau *cost of compliance* yang efisien.

Pertimbangannya adalah sektor ini membutuhkan investasi yang sangat besar dan jangka waktu yang panjang sehingga memiliki potensi risiko yang tinggi. Salah satu poin penting yang menjadi perbedaan pendapat antara Pemerintah dan Freeport adalah klausul *nail down vs prevailing*.

Pemerintah berpegang pada mandat UU Minerba, bahwa seluruh klausul perpajakan di rezim perizinan (IUP/IUPK) adalah *prevailing*, yaitu dinamis, mengikuti perubahan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Freeport tetap meminta sistem *nail down*, yaitu peraturan yang berlaku adalah peraturan saat kontrak ditandatangani atau perizinan diberikan (*statis*). Dalam konteks *Fiscal Stabilization Clause*, tuntutan PTFI dapat dipahami sebagai hal yang wajar.

Menurut Yustinus, sistem *nail down* juga tidak tepat jika dipahami semata-mata sebagai keuntungan perusahaan karena tarif yang rendah. Pasalnya dalam konteks *Kontrak Karya*, perusahaan justru membayar PPh 35%, jauh di atas tarif yang berlaku yaitu 25%.

Terhadap jenis pungutan negara lainnya, bahkan pada 2014 tercapai kesepakatan untuk menaikkan tarif royalti dan membayar bea keluar. Lebih lanjut Yustinus memaparkan, di sisi lain, Pemerintah perlu mendapat jaminan bahwa proyek yang dijalankan menguntungkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Di titik inilah, Pemerintah dan Freeport memiliki ruang negosiasi yang terbuka lebar dan saling menguntungkan

Tugas:

Diskusikan kasus tersebut, dan analisis kebijakan fiskal apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Jelaskan !

2) Lembar observasi diskusi kelompok

No.	Nama/ Kelompok	Penyampaian Gagasan	Kebenaran Konsep	Keaktifan	Kerjasama
1.					
2.					

Keterangan :

Skala penilaian laporan dibuat dengan rentang antara 1 s.d 4.

1 = kurang; 2 = cukup; 3 = Baik; 4 = sangat baik;

3. Penilaian Keterampilan

Aspek yang dinilai	Penilaian			
	1	2	3	4

Pengasaan Materi	Kemampuan konseptualisasi, menjelaskan dan berargumentasi sangat tidak menguasai	Kemampuan konseptualisasi, menjelaskan dan berargumentasi tidak menguasai	Penguasaan materi tentang kemampuan konseptualisasi, menjelaskan dan berargumentasi bagus tapi belum terarah	Penguasaan materi tentang kemampuan konseptualisasi, menjelaskan dan berargumentasi bagus sudah terarah
Penyajian	Sistematika penyajian dan visualisasi sangat tidak tersaji	Sistematika penyajian dan visualisasi sangat tersaji	Penyajian materi yang tersistematika dan visualisasi bagus tetapi belum menemukan konsep yang jelas	Penyajian materi yang tersistematika dan visualisasi bagus konsepnya jelas
Komunikasi Verbal	Penggunaan bahasa verbal, intonasi dan temponya	Penggunaan bahasa verbal, intonasi dan	Penggunaan bahasa verbal, intonasi dan	Penggunaan bahasa verbal, intonasi dan temponya sudah baik tapi

	sangat tidak baik	temponya tidak baik	temponya sudah baik tapi belum menggunakan ejaan yang benar	belum menggunakan ejaan yang benar
--	-------------------	---------------------	---	------------------------------------

**LAMPIRAN
REMEDIAL**

PROGRAM REMEDIAL

Satuan Pendidikan : SMAN 26 BANDUNG

Mata pelajaran : Ekonomi

Kelas/Semester : XI/1

Tahun pelajaran : 2019/2020

Materi pokok : Kebijakan Fiskal

Kompetensi Dasar :

3.5 Menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal

4.5 Menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal

• **INSTRUMEN PENILAIAN PROGRAM REMEDIAL**

Hari/Tanggal pelaksanaan :

No.	Nama	Jenis remedial	Nilai sebelum remedial	Nilai setelah remedial	keterangan

- **INSTRUMEN BUTIR SOAL PROGRAM REMEDIAL**

1. Kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi disebut dengan
 - A. Kebijakan moneter
 - B. Kebijakan pengeluaran
 - C. Kebijakan penerimaan
 - D. Kebijakan APBN
 - E. Kebijakan fiskal

2. Perhatikan pernyataan berikut

- 1) Menciptakan lapangan pekerjaan
- 2) Mengatur inflasi dengan mengatur perbankan
- 3) Menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan
- 4) Mencapai keseimbangan eksternal dengan mengatur suku bunga
- 5) Mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran
- 6) Untuk mewujudkan keadilan sosial

Dari pernyataan tersebut yang merupakan tujuan dari kebijakan fiskal adalah

- A. 1,2,3 dan 4
 - B. 1,2,4 dan 5
 - C. 1,3,5 dan 6
 - D. 2,3,4 dan 5
 - E. 3,4,5 dan 6
3. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, penyebab utamanya tidak lain dikarenakan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Pengangguran merupakan masalah yang susah dikendalikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga banyak menimbulkan dampak negatif khususnya bagi perekonomian di negara ini. Dari ilustrasi tersebut, kebijakan fiskal apa yang tepat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah penganggurnya tersebut?

- A. Menurunkan suku bunga
 - B. Menurunkan pajak pendapatan
 - C. Meningkatkan pajak pendapatan
 - D. Meningkatkan penawaran uang
 - E. Mengurangi pengeluaran agregat
4. Berikut ini yang termasuk instrumen kebijakan fiskal, yaitu ...
- A. transfer pemerintah dan pinjaman pemerintah
 - B. pajak dan pengeluaran pemerintah
 - C. pajak dan bunga
 - D. subsidi dan dana cadangan
 - E. pajak dan pinjaman pemerintah
5. Jika anggaran negara mengalami surplus, berarti ...
- A. Total penerimaan negara lebih besar dibandingkan pengeluaran pembangun
 - B. total penerimaan negara lebih kecil dibandingkan pengeluaran negara
 - C. total penerimaan negara lebih besar dibandingkan pengeluaran negara
 - D. total penerimaan pembangunan lebih kecil dibandingkan pengeluaran pembangunan
 - E. total penerimaan negara sama dengan pengeluaran negara

**LAMPIRAN
PENGAYAAN**

PROGRAM PENGAYAAN

Satuan Pendidikan : SMAN 26 BANDUNG

Mata pelajaran : Ekonomi

Kelas/Semester : XI/1

Tahun pelajaran : 2019/2020

Materi pokok : Kebijakan Fiskal

Kompetensi Dasar :

3.5 Menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal

4.5 Menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal

• **INSTRUMEN PENILAIAN PROGRAM PENGAYAAN**

Hari/Tanggal pelaksanaan :

No.	Nama	Jenis pengayaan	Nilai sebelum pengayaan	Nilai setelah pengayaan	keterangan

- **INSTRUMEN BUTIR SOAL PENGAYAAN**

1. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber dayanya. Namun negara yang kaya ini masih disibukan dengan masalah ekonomi yang sangat kompleks, salah satunya adalah kemiskinan. Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Penyebab utamanya tidak lain dikarenakan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Pengangguran merupakan masalah yang susah dikendalikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga banyak menimbulkan dampak negatif khususnya bagi perekonomian di negara ini. Sedangkan pengangguran disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya skill tenaga kerja itu sendiri.
 - a. Dari ilustrasi tersebut, kebijakan fiskal apa yang tepat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang kompleks tersebut? Jelaskan!
 - b. Ambil salah satu instrumen kebijakan fiskal yang nantinya dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut, analisis!